

Pengaruh SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Aisiyah Nur Rahmawati^{a,1}, Nurul Lathifah^{b,2}

^{a,b}Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia

Email: ^{a,1}08040120077@student.uinsby.ac.id*, ^{b,2}n.lathifah@uinsa.ac.id

*Korespondensi author

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel

Dikirim: 19-3-2024

Direvisi: 24-4-2024

Diterima: 25-4-2025

Kata Kunci

Pertumbuhan Ekonomi

SiLPA

Pajak Daerah

DAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SiLPA, pajak daerah, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari website laporan realisasi APBD 2018-2022 dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni sampling jenuh. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan hal bahwa 1) SiLPA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; 3) Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; serta 4) SiLPA, pajak daerah, dan DAK secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



1. Pendahuluan

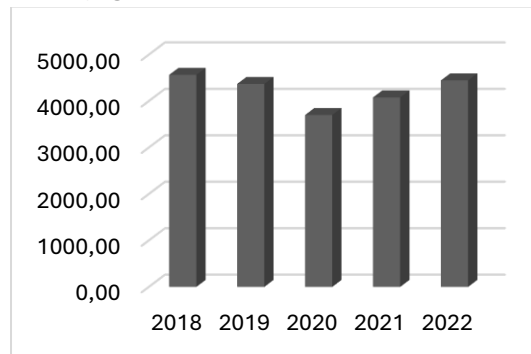
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan peran yang hakiki pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan provinsi Jawa Timur mempunyai aset baik SDA, industri maupun SDM, serta adanya potensi besar mampu berpartisipasi secara signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu tujuan esensial pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu tingkatan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan, 2018). Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemda ini didorong karena adanya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur sumber daya yang ada serta dibentuknya hubungan kerja dengan masyarakat agar terciptanya lapangan kerja baru tentunya nanti bisa berdampak terhadap berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Kuncorowati, 2017). Pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan pembangunan ekonomi yang mana indikasinya diharapkan bisa tercapai. Indikasi dari pembangunan ekonomi yaitu produktivitas dan pendapatan perkapita yang meningkat berdampak pada peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat (Mundiroh, 2019).

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dijadikan sebagai indikator pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang berasal dari semua aktivitas produksi yang ada dalam perekonomian di daerah (Mohklas & Purwati, 2019). Adanya infrastruktur sarana dan prasarana di daerah nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tentunya akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman apabila sarana dan prasarana yang tersedia mencukupi sehingga dapat berdampak pada peningkatan produktivitas dan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Semua kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat 2 kabupaten/kota yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro. Kontraksi yang terjadi pada Kabupaten Bangkalan ini imbas dari menurunnya kinerja ekonomi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2024). Bukan hanya Kabupaten Bangkalan saja, tetapi di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami kontraksi imbas dari menurunnya kinerja ekonomi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Surabaya di tahun 2022 sebesar Rp.434.268,3 milyar yang mana peran lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi yang sangat dominan dan peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah terjadi Kota Blitar Tahun 2018. Hal tersebut berarti secara umum menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat.

Di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat menunjukkan kondisi SiLPA yang menurun. Data SiLPA yang ada pada grafik 1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur di tahun 2018-2020 menunjukkan kondisi yang baik dikarenakan mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021-2022 SiLPA menunjukkan kondisi yang kurang baik dikarenakan mengalami peningkatan. Teori yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan sebagaimana yang dikutip dalam jurnal (Putra, 2017) menunjukkan jika SiLPA yang dikelola baik oleh pemerintah akan menunjukkan penurunan. Namun berdasarkan data SiLPA pada grafik 1 ternyata berbanding terbalik dengan teori tersebut. Menurut teori tersebut, pertumbuhan ekonomi dengan SiLPA seharusnya berbanding terbalik, artinya pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya SiLPA rendah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan

SiLPA Provinsi Jawa Timur ternyata pada tahun 2020-2022 justru berbanding lurus yaitu pertumbuhan ekonomi naik SiLPA juga naik.

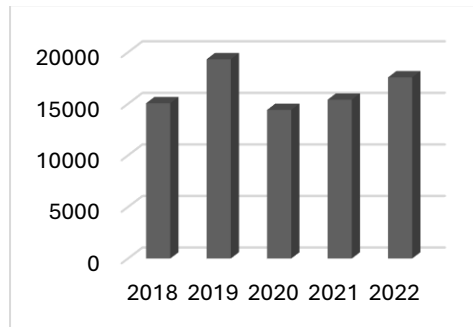


Gambar 1. SiLPA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Keberadaan SiLPA pada pengelolaan keuangan daerah harus dihindari karena kontraproduktif dengan proses penganggaran APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada tabel di atas, kondisi SiLPA cukup mengkhawatirkan karena terlihat dari 2 tahun terakhir SiLPA Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 366,94 milyar rupiah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sulikah (2018) menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian yang juga dilakukan oleh Kirana (2016) menunjukkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin besarnya SiLPA maka akan memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pada kemampuan keuangan daerah supaya pemerintah dan pembangunan daerah bisa menjadi lebih baik dapat melakukan salah satu cara dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan melihat keadaan dan potensi ekonomi pada daerah tersebut (Sintia & Suryono, 2019). Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut menjadikan pajak daerah sebagai salah satu komponen yang ada dalam PAD yang mempunyai kontribusi paling besar dan menjadi sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Pengumpulan pajak daerah yang efisien bisa meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dampak dari adanya pajak daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat menunjukkan kondisi pajak daerah yang juga meningkat. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan yang dikutip dalam jurnal (Miswar et al., 2021), jika terdapat peningkatan pada penerimaan pajak juga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang publik yang mendorong adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak meningkat signifikan maka output produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh PDRB juga akan meningkat karena pendapatan pajak daerah tersebut digunakan sebagai modal untuk kegiatan produksi barang dan jasa yang akan mendorong kegiatan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dengan pajak daerah Provinsi Jawa Timur ternyata sesuai dengan teori.



Gambar 2. Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

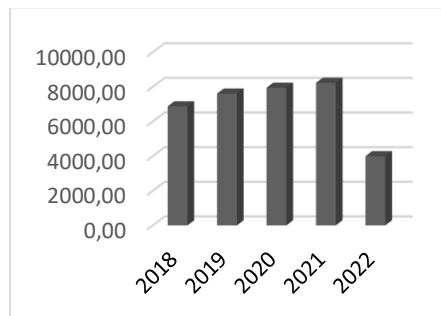
Realisasi pajak daerah berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020 pajak daerah terlihat mengalami penurunan secara drastis. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mana mulai diberlakukannya pembatasan sosial dan ekonomi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Penurunan realisasi pajak terjadi karena adanya kemungkinan penurunan pendapatan sehingga kesulitan untuk membayar pajak. Namun di tahun selanjutnya, pajak daerah sudah kembali mengalami peningkatan bahkan di tahun 2022 memiliki realisasi anggaran pajak daerah yang bisa dibilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya karena adanya pemulihan ekonomi yang terjadi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). Tingginya penerimaan pajak dapat berdampak pada meningkatnya PAD. Jika terjadi peningkatan pada penerimaan PAD maka alokasi belanja modal yang dipergunakan pemerintah daerah juga semakin besar (Dalail et al., 2020).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budi et al., (2021) memberikan hasil yang sesuai dengan teori yang mana pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulista (2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) terjadi akibat kurang optimalnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palopo, serta kurangnya kesadaran diri masyarakat akan ketaatan dalam membayar pajak daerah. Selain itu penerimaan pajak daerah lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja rutin bukan digunakan untuk belanja infrastruktur yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini menimbulkan ketergantungan yang semakin besar terhadap dana alokasi umum yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah daerah, padahal seharusnya pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan pembangunan ekonomi bagi daerah.

Selain PAD, dana perimbangan juga menjadi salah satu sumber pendanaan yang dimiliki daerah. Sumber dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Salah satu sumber pendanaan yaitu DAK yang didistribusikan dari APBN untuk wilayah tertentu dalam hal pembiayaan dilakukannya desentralisasi yang bertujuan untuk memodali kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pada prioritas nasional dan yang disarankan oleh daerah tertentu. DAK mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara investasi infrastruktur yang dapat membuat lapangan kerja dan membenahi konektivitas daerah. Selain itu, DAK juga dapat menopang anggaran pengoperasian dan perawatan sarana dan prasarana pada tahun tertentu. Kebutuhan pada

wilayah transmigrasi, beragam jenis investasi, adanya pembangunan jalan di wilayah kecil menjadi contoh dari adanya kebutuhan khusus yang tidak terduga (Pinem et al., 2020).

Di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat menunjukkan kondisi DAK yang juga meningkat. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan yang dikutip dalam Saleh (2017) bahwa DAK dipergunakan untuk mendukung investasi dalam infrastruktur dan pendidikan yang menjadi komponen penting dari faktor produksi pada teori pertumbuhan neo-klasik. Adanya investasi ini membuat produktivitas SDM dan modal menjadi meningkat. Proyek yang dananya bersumber dari DAK seperti pembangunan jalan raya atau fasilitas publik lainnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang ada pertumbuhan ekonomi dan DAK didapatkan tidak sesuai dengan teori yang mana pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan tetapi DAK mengalami kenaikan.



Gambar 2. Realisasi DAK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Dari grafik di atas, memperlihatkan jika DAK di Jawa Timur dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2022 realisasi DAK mengalami penurunan secara drastis. Realisasi DAK tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 yaitu Kota Surabaya sebesar 769,75. Namun, untuk realisasi DAK terendah terdapat pada Kota Batu di tahun 2018. Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktafia et al., (2018) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena DAK yang diterima pemerintah daerah memang dialokasikan khusus untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah seperti pembiayaan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana lebih besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar DAK yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Namun, terdapat penelitian lain juga yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafia et.al., yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputera & Pandoyo, (2020) yang menunjukkan bahwa bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti pemanfaatan DAK belum sepenuhnya diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mewujudkan penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pajak Daerah, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Pada Tahun 2018-2022”.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara agar penyediaan berbagai macam barang ekonomi untuk masyarakat semakin banyak seiring dengan berkembangnya teknologi, serta penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang dibutuhkan (Rapanna & Sukarno, 2017). Para ekonom bersepakat mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan produksi barang dan jasa pada waktu tertentu. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kinerja suatu ekonomi masyarakat dan terbentuknya peningkatan pendapatan nasional.

Dalam pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (GDP) menjadi indikator untuk mengukur pendapatan total yang dihasilkan per orang pada perekonomian. Sedangkan data Produk Nasional Bruto (GNP) tidak umum digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan apabila dalam GNP hanya bisa melihat batas wilayah, terbatas pada suatu negara yang terkait (Hasyim, 2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang diperoleh dari keseluruhan unit produksi pada suatu daerah dalam satu periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dari keseluruhan unit produksi pada suatu daerah dalam satu periode. PDRB terbagi 2 yaitu atas dasar harga berlaku yang dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga berlaku merupakan dasar untuk mengukur kemampuan kapasitas ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB harga konstan digunakan sebagai dasar untuk menilai pertumbuhan ekonomi per tahun tanpa terpengaruh pada faktor harga (Leonita & Sari, 2019).

Secara umum terdapat pendekatan teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pertumbuhan Neo-Klasik menjelaskan mengenai keseimbangan pada jangka panjang diperoleh dari beragam jumlah tenaga kerja dan modal pada fungsi produksi serta perkembangan teknologi yang tentunya memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Teori ini diperkenalkan dan dikembangkan teorinya oleh Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1956. Adanya tenaga kerja, modal dan teknologi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan neo-klasik. Tetapi, teori pertumbuhan neo-klasik memaparkan bahwa ekuilibrium sementara tidak sama dengan ekuilibrium jangka panjang yang tidak membutuhkan salah satu dari ketiga faktor tersebut (Basmar et al., 2021).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

SiLPA yaitu sumber dari penerimaan pembiayaan yang berada dalam struktur APBD yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan anggaran jika realisasi pendapatan yang didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja. Bukan hanya itu, SiLPA juga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan wajib lainnya sampai akhir tahun anggaran belum teratasi dan membiayai pengimplementasian kegiatan lanjutan dari beban belanja langsung (Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2021). Semakin banyaknya SiLPA yang ditunjukkan pada suatu wilayah mengartikan bahwa penganggaran yang mereka lakukan kurang cermat (kurang matangnya perencanaan) atau kelemahan pada pengimplementasian anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menjelaskan tertundanya alokasi belanja atau tidak terserapnya anggaran (Ratna, 2018).

Indikator yang menunjukkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah pada saat mengelola APBD yang mana totalnya terlihat pada akhir bulan Desember yaitu SiLPA. Hal tersebut dikarenakan SiLPA hanya dapat terbentuk jika dalam APBD mengalami keuntungan dan pembiayaan netto bernilai positif yang mana bagian penerimaan terjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bagian pengeluaran pembiayaan. Adanya profit pada anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka pada tahun selanjutnya defisit APBD dapat tertutup (Rani, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2023), SiLPA bersumber dari beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh total realisasi PAD yang sangat melampaui total PAD yang diperkirakan. Hal ini nantinya bisa berdampak terhadap realisasi pendapatan daerah.
2. Pelampauan dana perimbangan dikarenakan total realisasi dana perimbangan lebih banyak daripada total dana perimbangan yang diperkirakan. Tentunya hal ini dapat berdampak pada total realisasi pendapatan daerah.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mana jika pada penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya lebih banyak dibandingkan total perkiraan nantinya dapat mempengaruhi total realisasi pendapatan daerah sama seperti penerimaan PAD, dan dana perimbangan.
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan yang mana penerimaan pembiayaan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari SiLPA, cairnya dana cadangan, dan utang daerah yang nantinya pemerintah daerah membayarkannya kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan mempengaruhi pembiayaan netto apabila realisasi penerimaan pembiayaan melebihi anggaran.
5. Penghematan belanja dilakukan pemerintah daerah yang nantinya dapat berdampak terhadap total realisasi belanja daerah. Apabila perbedaan antara total belanja yang telah diperkirakan lebih sedikit daripada realisasi belanja nantinya dapat berdampak pada perhitungan surplus atau defisit anggaran.
6. Kewajiban terhadap pihak ketiga yang belum teratasi sampai akhir tahun yaitu kewajiban pemda terhadap pihak ketiga yang diharuskan untuk diselesaikan di akhir tahun tetapi pemerintah daerah tidak membayarkannya. Hal ini tentunya akan membuat kas daerah yang tidak berkurang akibat adanya biaya yang tidak dikeluarkan.
7. Sisa dana kegiatan lanjutan yaitu tidak habisnya dana yang dianggarkan yang tentunya dapat berdampak pada sisanya dana di kas pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengertian bahwa pajak daerah yaitu kewajiban dalam berpartisipasi kepada daerah yang terutang oleh masing-masing orang atau badan yang sifatnya memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran private person kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak adanya return service, yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada keuangan

pemerintah, pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan belanja pemerintah (Imtiyazari et al., 2023).

Pajak daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dibagi beberapa jenis. Terdapat beberapa jenis pajak provinsi diantaranya yakni pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, tarif pemalihan nama kendaraan bermotor, dan pajak air rokok. Selain itu, pajak kabupaten/kota juga memiliki beragam jenis diantaranya yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walis, tarif perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pada suatu daerah adanya peningkatan usaha seperti hotel, hiburan, dan restoran dapat berdampak positif pada penerimaan pemerintah daerah dan pendapatan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN didistribusikan untuk daerah bertujuan agar dapat menyokong kebutuhan khusus yang menjadi urusan daerah. Dana alokasi khusus yaitu salah satu cara yang digunakan pemerintah pusat untuk mentransfer keuangan ke daerah dengan tujuan agar ketersediaan sarana dan prasarana fisik daerah dapat meningkat sesuai dengan prioritas nasional pada bidang pendidikan, kesehatan, jalan, prasarana pemerintah, kelautan, dan perikanan, irigasi dan air minum, lingkungan hidup, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian, dan keluarga berencana (KB) serta berkurangnya ketimpangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Alvaro, 2022).

Pemerintah menentukan terdapat 3 kriteria DAK yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk penetapan kriteria umum pemerintah juga harus memikirkan kemampuan keuangan daerah pada APBD. Penetapan kriteria khusus harus mencermati peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Yang terakhir untuk kriteria teknis penetapannya dilakukan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Daerah yang mendapatkan DAK harus menyiapkan dana minimal 10% dari alokasi DAK. Dana pendamping ini dianggarkan pada APBD, tetapi daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu maka tidak wajib menyiapkan dana pendamping (Ikhwan, 2017).

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang diolah menggunakan metode statistik dengan berfokus pada analisis data numerikal (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bersifat asosiatif kausal (hubungan sebab akibat) yakni metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yang mana berarti sampel yang digunakan yaitu keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 sebanyak 38 kabupaten/kota.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Studi pustaka merupakan segala cara yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai pembahasan atau persoalan yang sedang atau akan diteliti. Biasanya informasi tersebut didapatkan dari jurnal, buku, laporan penelitian, skripsi, laporan ilmiah, tesis, peraturan, undang-undang, buku tahunan, maupun ensiklopedia baik itu secara softfile ataupun hardfile (Hermawan, 2019).
2. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpulan data dan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang diperlukan, dilanjutkan dengan melakukan pencatatan dan perhitungan dengan cara mengumpulkan informasi dengan tujuan agar masalah dapat terselesaikan dengan data-data yang relevan.
3. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana merupakan data yang diperoleh, didapatkan, dan telah dikerjakan sebelumnya oleh pihak ketiga. Sumber data pada penelitian ini yaitu total realisasi anggaran SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK yang diperoleh dari website DJPK Kemenkeu melalui internet, serta data pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari website BPS.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu metode yang dianggap penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya analisis, data dapat diberikan arti dan makna yang bermanfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi data panel.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang digunakan untuk umum (Sugiyono, 2019). Pada statistik deskriptif ini juga dapat digunakan untuk membuat perbandingan antara rata-rata data sampel atau populasi, mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, serta melakukan prediksi dengan analisis regresi.

Analisis Regresi Data Panel

Teknik analisis regresi data panel mempunyai langkah-langkah pengujian diantaranya yaitu pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model dan interpretasi model. Selain itu, dalam regresi data panel ditawarkan 3 teknik yang digunakan yaitu common effect, fixed effect, dan random effect (Sakti, 2018).

Dalam pemilihan model estimasi data panel terdapat 3 jenis uji yang bisa digunakan diantaranya yaitu :

1. Uji Chow yaitu jenis pengujian yang digunakan untuk menentukan fixed effect model atau common effect model yang paling cocok digunakan untuk memperkirakan data panel.
2. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model fixed effect atau random effect yang paling cocok digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Apabila model pada penelitian ini, syarat bebas dari asumsi klasik terpenuhi, yang mana data tidak mengandung multikolinearitas, dan heterokedastisitas, maka selanjutnya dapat

dilaksanakan pengujian regresi data panel. Oleh karena itu, perlu diadakan pengujian asumsi klasik diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapatkan diperlukan adanya uji hipotesis. Adapun uji hipotesis diantaranya yaitu uji-t, uji f, dan koefisien determinasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel penelitian yaitu SiLPA, Pajak Daerah, DAK, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendeskripsikan masing-masing variabel independen (SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK) dan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi), maka pada bagian ini disajikan deskripsi data yang telah diperoleh dengan disajikan meliputi *nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi*.

1. Pada variabel SiLPA mean sebesar 368.3291 dengan nilai SiLPA tertinggi sebesar 3217.800, dan nilai terendahnya sebesar 30.16000. Nilai standard deviasi SiLPA sebesar 393.5779 (di atas rata-rata) yang artinya SiLPA mempunyai tingkat variasi data yang tinggi.
2. Pada variabel Pajak Daerah (PD) didapatkan rata-rata sebesar 260.3209 dengan nilai PD tertinggi sebesar 4157.520, dan nilai terendahnya sebesar 22.00000. Nilai standard deviasi PD sebesar 615.8722 (di atas rata-rata) yang artinya PD mempunyai tingkat variasi data yang tinggi.
3. Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) mendapatkan mean sebesar 307.3214 dengan nilai DAK tertinggi sebesar 769.7500, dan nilai terendahnya sebesar 59.44000. Nilai standard deviasi DAK sebesar 132.5729 (dibawah rata-rata) yang artinya DAK mempunyai tingkat variasi data yang rendah.
4. Untuk variabel dependennya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) didapatkan rata-rata sebesar 43713.07 dengan nilai PE tertinggi sebesar 434268.3 dan nilai terendahnya sebesar 4566.200. Jika dilihat nilai standard deviasinya, nilai standard deviasi PE sebesar 67640.04 (di atas rata-rata) yang artinya PE mempunyai tingkat variasi data yang tinggi.

Analisis Regresi Data Panel

Uji Chow

Pengambilan keputusan didasarkan pada landasan jika nilai prob. $F < 0,05$ maka menetapkan untuk menggunakan *fixed effect* sedangkan jika nilai prob. $F > 0,05$ maka menetapkan untuk menggunakan *common effect*.

Table 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	251.298481	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	788.407060	37	0.0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2024)

Hasil uji *Chow* dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < 0,05$. Oleh karena itu, secara statistik hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Maka model estimasi yang paling cocok untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Dasar dari pengambilan keputusan yaitu nilai prob. *cross-section random* < 0,05 maka menetapkan untuk menggunakan *fixed effect model* sedangkan jika nilai prob. *cross-section random* > 0,05 maka menetapkan untuk menggunakan *random effect model*.

Table 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	190.425595	3	0.0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2024)

Hasil uji *hausman* dari tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar $0.0000 < 0,05$ sehingga menyebabkan penolakan H_0 dan penerimaan H_1 berdasarkan analisis statistik. Maka, model estimasi yang paling cocok untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu nilai korelasi masing-masing variabel bebas < 0,85 maka H_0 diterima atau tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation			
	SiLPA	Pajak Daerah	DAK
SiLPA	1.000000	0.201028	0.150467
Pajak Daerah	0.201028	1.000000	0.306523
DAK	0.150467	0.306523	1.000000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel 4.7, koefisien korelasi antar variabel independen (SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK) berada di bawah 0,85 sehingga hipotesis nol (H_0) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Dasar pengambilan Keputusan uji heterokedastisitas yaitu nilai probabilitas > 0,05, artinya H_0 diterima atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Table 4. Hasil Uji Heterokedastisitas-Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.431239	699.4406	0.009195	0.9927
SILPA	0.240026	0.470243	0.510430	0.6105
PD	2.243064	1.776598	1.262562	0.2087
DAK	1.374399	2.229019	0.616594	0.5384

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2024)

Hasil uji *Glejser* menunjukkan bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga diterima hipotesis nol (H_0). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

Hasil Estimasi

Menurut hasil penilaian yang sudah dilakukan menggunakan uji chow dan uji hausman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* yang menjadi model terbaik digunakan pada penelitian ini. Adapun persamaan regresinya yaitu :

$$PE_{it} = 30133.96 - 2.76 \cdot SILPA_{it} + 35.50 \cdot PD_{it} + 17.39 \cdot DAK_{it} + e_{it}$$

Table 5. Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30133.96	1272.560	23.67980	0.0000
SILPA	-2.735585	0.855559	-3.197424	0.0017
PD	35.50311	3.232336	10.98373	0.0000
DAK	17.39061	4.055468	4.288189	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999089	Mean dependent var		43713.07
Adjusted R-squared	0.998844	S.D. dependent var		67640.04
S.E. of regression	2299.758	Akaike info criterion		18.50750
Sum squared resid	7.88E+08	Schwarz criterion		19.20817
Log likelihood	-1717.212	Hannan-Quinn criter.		18.79133
F-statistic	4083.655	Durbin-Watson stat		1.349683
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10 (2024)

Berdasarkan pada tabel 5 didapatkan bahwa hasil uji-t pada SiLPA memiliki nilai prob. t-statistik adalah $0,0017 < 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.; pajak daerah memiliki nilai prob. t-statistik $0.0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi; dan DAK memiliki nilai prob. t-statistik $0.0000 < 0,05$. Artinya variabel DAK berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada uji-f dalam penelitian menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya variabel SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara simultan. Untuk koefisien determinasi menunjukkan bahwa SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0, 998844 atau 99,88%, sedangkan variabel lain diluar yang diteliti memberikan pengaruh sebesar 0,12%.

Analisis Pengaruh SiLPA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini memberikan hasil bahwa SiLPA memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Data ini ditunjukkan pada tabel 4.9 menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,0017 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kirana (2016) yang membuktikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2017), Sulikah (2018) dan Pinem et al., (2020). Penelitian ini membuktikan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang dikutip dalam jurnal Putra, (2017) yang menyebutkan bahwa SiLPA bisa memberikan pengaruh terhadap tingkat investasi dan akumulasi modal. Semakin besar SiLPA maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang disebabkan oleh ketidakefisien dan efektifnya penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh

ketidacermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal, namun besarnya SiLPA perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di kabupaten/kota di Jawa Timur semakin baik.

Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari penelitian ini memberikan hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 4.9 menunjukkan nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,0000 < 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Miswar et al., (2021) dan Budi et al., (2021) yang membuktikan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai belanja pembangunan dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pada penerimaan pajak juga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang publik yang mendorong adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan pajak akan menyebabkan peningkatan barang dan jasa produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena dana pajak daerah digunakan sebagai modal produksi barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Miswar et al., 2021).

Analisis Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari penelitian ini memberikan hasil bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.10 jika nilai prob. t-statistik sebesar $0,0000 < 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvaro (2022) dan Oktafia et al., (2018) yang membuktikan bahwa hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang dapat berguna sebagai sumber dana tambahan pendukung investasi infrastruktur yang bisa membuat efisiensi dan daya saing daerah menjadi meningkat. Adanya investasi ini membuat produktivitas SDM dan modal menjadi meningkat. DAK berdampak pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas yang memerlukan dana yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mempunyai target khusus terutama dalam bidang pembangunan yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi daerah, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin merata perekonomian suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonominya (Saleh, 2017). Berdasarkan pada data yang ada realisasi DAK kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 dianggap baik dan stabil karena realisasi per tahunnya rata-rata mencapai angka 90%.

Analisis Pengaruh SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari penelitian ini memberikan hasil bahwa SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.9 jika nilai prob F statistik sebesar $0,000000 < 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinem et al., (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017 yang membuktikan

bahwa DAK, SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokorowu et al., (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara yang membuktikan bahwa PAD, DBH, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Minahasa Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi et al., (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang membuktikan secara parsial maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada $\alpha = 5\%$ selama periode tahun 2002-2018.

5. Kesimpulan

Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data sekunder dari laporan realisasi APBD dan BPS Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0017 kurang dari 0,05. Maka H_1 diterima yang mana artinya variabel SiLPA berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari nilai prob. t-statistik sebesar 0.0000 kurang dari 0,05. Maka H_1 diterima atau variabel pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
- 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai prob. t-statistik sebesar 0.0000 kurang dari 0,05. Maka H_1 diterima atau variabel DAK mempunyai pengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
- 4) Secara simultan, SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan prob F statistik sebesar $0.0000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa H_0 ditolak atau variabel SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget*, 7(2), 256–276.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022*. <https://bojonegorokab.bps.go.id/indicator/52/82/2/laju-pertumbuhan-ekonomi-menurut-lapangan-usaha.html>
- Bangkalan, B. P. S. K. (2024). *Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022*. <https://bangkalankab.bps.go.id/indicator/52/34/2/laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>
- Basmar, E., Sartika, S. H., Sulaeman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, Purba, B., Wisnujati, N. S., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi dan Pembangunan Strategi dan Kebijakan* (J. Simarmata (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Budi, T. S., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 177–194. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16305>

- Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Portal Data SIKD*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi=13&pemda=00>
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro* (2nd ed.). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=aoyYDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran.
- Ikhwan, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pegawai terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Artikel Ilmiah*, 1–20.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. 51.
- Kirana, T. A. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus 38 Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur Tahun 2009-2013)*. Universitas Brawijaya.
- Kuncorowati, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. *Jurnal Profita*, 4, 1–22.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed.). ANDI.
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 153–169.
- Mohklas, & Purwati, D. I. (2019). Memoderasikah Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal? (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). *Stability: Journal of Management and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.26877/sta.v2i1.4029>
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122>
- Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 53–62.
- Pemerintah Kota Tanjungbalai. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026* (pp. 1–47). BAPPEDA-Kota Tanjungbalai.
- Pinem, I., Mardha, F., & Malau, Y. N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Ekonomi, 03(2).

- Putra, S. K. (2017). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014)*.
- Rani, Y. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan Kinerja Keuangan Daerah (Studi Pada 38 Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur Tahun 2012-2016). In *Jurnal Ilmiah*.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (H. Syamsul (ed.); p. 31). CV Sah Media. <https://books.google.co.id/books?id=dVNtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ekonomi+pembangunan&hl=id&sa=X&ved2ahUKEwj0k9XF16D5AhXVS2wGHb9BB6YQAF6BAgGEAM#v=onepage&q&f=false>
- Ratna, I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal EL-RİYASAH*, 9(1), 38–39. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6836>
- Sakti, I. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews*.
- Saleh. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun. In *Skripsi*.
- Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekbank*, 3(2), 17–28.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 71 (2023). <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8). www.djpk.depkeu.go.id.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sulikah. (2018). *Pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Silpa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Universitas Islam Negeri “SMH.”
- Sulista. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palopo*.